



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES  
KOMISI X DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022  
TANGGAL 16 S.D. 20 APRIL 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI berfokus pada bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional. Pada Masa Sidang IV 2021-2022, sesuai dengan hasil Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 15 Maret 2022, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat.

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI, Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan, Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022;
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 15 Maret 2022 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan dan

- kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 di Provinsi Daerah Jawa Timur.
2. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam masa pandemi Covid-19, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
  3. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Non RUU Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan kebijakan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19.

### **C. Agenda Kunjungan Kerja**

1. Melakukan pertemuan dengan:
  - a. Gubernur Provinsi Jawa Timur
  - b. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - c. Muspida dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur.
  - d. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Ketua LPMP, Dewan Pendidikan, PGRI, Tokoh-tokoh Pendidikan, dan para Pakar Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
  - e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, PHRI, ASITA, PUTERI, dan instansi terkait yang menangani kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Provinsi Jawa Timur.
  - f. KONIDA, KNPI, organisasi kepemudaan, dan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur.
  - g. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Timur.
  - h. Pimpinan PTN, PTS, dan LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, yaitu:
    - 1) Ketua LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur
    - 2) Rektor Institut Teknologi Sepuluh November
    - 3) Rektor Universitas Airlangga
    - 4) Rektor Universitas Negeri Surabaya
    - 5) Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
    - 6) Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
    - 7) Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
    - 8) Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya
    - 9) Direktur Akademi Pariwisata Majapahit
2. Peninjauan lapangan bidang pendidika tinggi ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

### **D. Tim Kunjungan Kerja**

Tim kunjungan kerja reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, dipimpin oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (A-539/FPKS), Wakil Ketua Komisi

X DPR RI didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh pejabat dari mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Suhadi, S.Pd., M.T. selaku Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI, Dadang Rizki Ratman selaku Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha dan Reza Fahlevi Direktur Event Daerah Kemenparekraf/Baparekraf RI, Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Deputi Pengembangan Pemuda, dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj. Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO, dan Syamsul Qomar Tenaga Ahli Menteri Kemempora RI serta dari Perpustakaan Nasional RI hadir Dr. Joko Santoso, M.Hum. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

## II. ISI LAPORAN

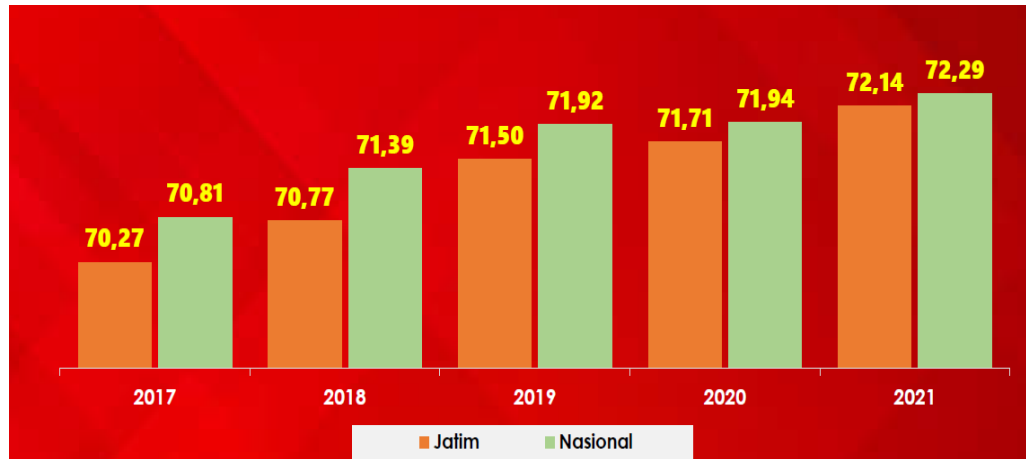
### A. Identifikasi Data dan Informasi

#### 1. Informasi Umum tentang Provinsi Jawa Timur

- a. Provinsi Jawa Timur di saat Pandemi Covid-19 dengan cepat melakukan pemulihan ekonomi, terbukti pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur dari terkontraksi 2,33% pada tahun 2020 dan 2021 telah tumbuh 3,57 %. Terkait data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 s.d. 2021 dapat dicermati dari grafik sebagai berikut:



- b. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 s.d. 2021, dari data di bawah tergambar IPM di provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan tiap tahun.



Adapun data komponen IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sebagai berikut; (1) harapan lama sekolah selama 13,36 tahun, (2) rata-rata lama sekolah 7,88 tahun, (3) umur harapan hidup 71,38 tahun, dan (4) pengeluaran perkapita 11,707 (satuan juta rupiah).

## 2. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana paparan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara umum memiliki permasalahan sebagai berikut; (1) disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan antar lembaga masih terjadi, (2) sarana dan prasarana belum merata dan tidak sesuai dengan pemanfaatan, (3) belum adanya relevansi antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dunia kerja/usaha, (4) masih terdapat perbedaan kualitas, kuantitas, spesifikasi, kompetensi dan sebaran pada pengelolaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, (5) belum terjadi sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dan (6) kemampuan anggaran setiap sekolah masih bergantung pada jumlah siswa (BOS, BPOPP, Komite Sekolah).
- b. Pada sektor penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa unggulan yang dirangkum di dalam Program Jatim Cerdas, yaitu:
  - 1) Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) sebagai bantuan pengganti SPP untuk peserta didik SMA, SMK dan PK-PLK.
  - 2) Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK ditujukan untuk peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK.
  - 3) Program Negeri Taruna Jatim berupa program sekolah unggulan dan berasrama dengan memberikan penguatan kurikulum bela negara dan kesamaptan yang bekerja sama dengan TNI-Polri di 4 sekolah (SMAN Taruna Nala Jatim di Kota Malang, SMAN 3 Taruna

Angkasa Jatim di Kota Madiun SMAN 2 Taruna Bhayangkara Jatim di Banyuwangi, SMAN 5 Taruna Brawijaya Jatim di Kediri).

- 4) Program SMA *Double Track*, yaitu memberikan ketrampilan tambahan kepada siswa SMA yang berencana tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
  - 5) Program Revitalisasi SMK yaitu berupa pemenuhan sarana dan prasarana untuk menjadi pusat Sumber Belajar Mengajar bagi sekolah di sekitarnya.
  - 6) Program BODSA MADIN, yaitu pemberian operasional pembelajaran dan honor guru pada Madrasah Diniyah.
  - 7) Program Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan GTT dan PTT lembaga Negeri, serta Honorarium Kinerja Guru Non PNS usia min 40 tahun dan maksimal 60 tahun.
- c. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan mengacu aturan sebagai berikut:
- 1) Mulai 2 Januari 2022 semua satuan Pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria.
  - 2) Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten/kota.
  - 3) Orang tua/wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya.
  - 4) Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol Kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Adapun pemetaan berdasarkan level PPKM pada tiap-tiap kabupaten/kota sebagai berikut:

PPKM LEVEL 1 DAN PPKM LEVEL 2	CAPAIAN VAKSIN	KETENTUAN	INMENDAGRI NOMOR 18		GTK		LANJIA	
			TAHUN 2022		Update, Senin 4 April 2022			
			22 Maret - 4 APRIL 2022		Vaksin 1 (%)	Vaksin 2 (%)	Vaksin 1 (%)	Vaksin 2 (%)
PPKM LEVEL 1 DAN PPKM LEVEL 2	GTK diatas 80% dan Lansia diatas 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa masuk setiap hari 100%,</li> <li>6 jam pelajaran setiap hari @ 45 menit,</li> <li>Istirahat 15 menit dalam kelas,</li> <li>Kantin tutup, siswa bawa bekal dari rumah.</li> </ul>	1	KOTA KEDIRI	96.42%	94.44%	130.78%	109.37%
			2	KOTA MOJOKERTO	95.35%	92.75%	148.73%	105.81%
			3	KOTA BLITAR	95.14%	94.23%	125.38%	102.28%
			4	KOTA SURABAYA	96.64%	91.03%	125.19%	100.37%
			5	KOTA MALANG	93.21%	87.76%	103.75%	92.85%
			6	KOTA MADIUN	94.43%	98.39%	107.33%	89.14%
			7	KOTA BATU	91.75%	86.13%	104.77%	85.57%
			8	KOTA PASURUAN	96.06%	94.14%	96.93%	75.66%
			9	KAB. SIDOARJO	97.53%	96.19%	82.55%	68.77%
			10	KAB. MOJOKERTO	96.68%	87.96%	86.10%	68.57%
			11	KAB. LAMONGAN	99.25%	98.83%	82.81%	65.89%
			12	KOTA PROBOLINGGO	95.27%	94.01%	84.92%	65.44%
			13	KAB. JOHANG	94.09%	89.74%	86.28%	65.40%
			14	KAB. MALANG	99.47%	99.14%	81.65%	62.39%
			15	KAB. GRESIK	98.99%	98.99%	85.18%	62.00%
			16	KAB. MAGETAN	95.48%	87.85%	78.89%	61.92%
			17	KAB. PACITAN	96.78%	92.75%	78.88%	57.18%
			18	KAB. BANYUWANGI	98.17%	98.17%	81.52%	56.48%
			19	KAB. TRENGGALEK	95.67%	94.13%	70.78%	55.16%
			20	KAB. BLITAR	92.22%	90.76%	74.64%	55.15%
			21	KAB. MADIUN	92.73%	96.39%	71.77%	55.02%
			22	KAB. BOJONEGORO	93.73%	91.78%	85.03%	54.39%
			23	KAB. TULLUNGAGUNG	91.96%	94.22%	74.05%	54.33%
			24	KAB. KEDIRI	95.39%	94.12%	75.91%	50.61%
PPKM LEVEL 3	GTK 50%-80% dan Lansia 40%-50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa masuk setiap hari shift 50%,</li> <li>6 jam pelajaran setiap hari @ 45 menit,</li> <li>Istirahat 15 menit dalam kelas,</li> <li>Kantin tutup, siswa bawa bekal dari rumah.</li> </ul>	25	KAB. TUBAN	93.58%	89.64%	78.75%	48.63%
			26	KAB. PROBOLINGGO	89.15%	83.01%	75.46%	48.29%
			27	KAB. PONOROGO	94.33%	90.79%	72.12%	47.82%
			28	KAB. NGAWI	93.45%	96.05%	78.22%	47.44%
			29	KAB. PASURUAN	93.78%	90.48%	70.90%	47.37%
			30	KAB. NGANJUK	94.34%	91.98%	74.28%	45.91%
			31	KAB. BONDOWOSO	84.09%	83.53%	65.53%	43.95%
			32	KAB. SITUBONDO	94.23%	84.62%	66.41%	41.65%
			33	KAB. LUMAJANG	99.64%	97.62%	64.27%	40.21%
			34	KAB. JEMBER	71.03%	69.85%	64.25%	40.07%
			35	KAB. BANGKALAN	76.56%	73.51%	46.22%	31.16%
			36	KAB. SAMPANG	71.71%	53.50%	49.62%	27.61%
			37	KAB. SUMENEP	78.09%	54.69%	47.60%	26.48%
			38	KAB. PAMEKASAN	93.72%	89.07%	35.07%	20.14%

d. Pelaksanaan vaksinasi tenaga guru dan kependidikan di Provinsi Jawa Timur sudah mencapai sebanyak 98,26% dari jumlah total guru 128.149 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sudah divaksin I sebanyak 125.923 (98,26%)
- 2) Sudah divaksin II sebanyak 117.411 (91,62%)

Adapun pelaksanaan vaksinasi untuk peserta didik (SMA, SMK dan SLB) di Provinsi Jawa Timur untuk peserta didik sebanyak 1.288.283 telah mencapai 94,79% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sudah divaksin I sebanyak 1.221.121 (94,79%).
- 2) Sudah divaksin II 1.134.924 (88,10%).

e. Guna meningkatkan akses bahan pembelajaran pada daerah atau kawasan yang tidak dijangkau internet (*blankspot*), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan fasilitas Anjungan Belajar Mandiri (ABM) – Jatim Cerdas. Anjungan Belajar Mandiri–Jatim Cerdas, merupakan sistem manajemen pembelajaran (*Learning Manajemen System*) yang

dapat dioperasikan secara *online* maupun secara *offline* (luar jaringan), secara operasional peserta didik datang ke lokasi tempat ABM ditempatkan (balai desa, atau sekolah) untuk mengunduh secara *offline* (menggunakan *bluetooth* atau *flashdisk*) atau mencetak bahan ajar (*e-book*, video, Lembar Kerja Siswa, dan berbagai latihan soal). Guru dapat mengisi (*upload/update*) bahan ajar ke dalam mesin ABM Jatim Cerdas disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.



(Contoh Mesin ABM - Jatim Cerdas)

- f. Pada bidang pendidikan tinggi, dengan sebaran perguruan tinggi yang ada menjadikan Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penerimaan mahasiswa tertinggi dari jalur SNMPTN pada tahun 2022, dengan jumlah 17.807 mahasiswa dari yang ikut mendaftar sebanyak 88.375 mahasiswa.
- g. Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek RI tahun 2021, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki guru dengan minat tertinggi untuk mempelajari dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran.  
Berikut data perbandingan minat guru dari berbagai provinsi pada tahun 2021.



- h. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan dalam rentang antara 20 Agustus 2020 – 20 Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah mengalami penurunan dari 11,89% menjadi 9,54%, namun TPT tertinggi sebesar 9,54 merupakan lulusan SMK. Atas dasar tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas dan pengembangan SMK.
- i. Pelaksanaan Seleksi 1 Juta Guru PPPK di Provinsi Jawa Timur secara umum berjalan lancar, namun masih menyisakan beberapa permasalahan pasca pelaksanaan seleksi, di antaranya sekolah swasta kehilangan guru yang kompeten karena lolos PPPK yang penempatannya di sekolah negeri, GTT yang tidak lolos PPPK terancam kehilangan jam mengajar, karena masuknya Guru PPPK dari luar sekolah. Adapun yang lulus di tahap I sebanyak 5.326 peserta, dan pada tahap II sebanyak 3.819 peserta, sehingga total yang lulus sebanyak 9.154 peserta. Dari jumlah yang lulus, sebanyak 9.106 telah mendapatkan SK PPPK.
- j. Distribusi bantuan KIP Kuliah pada perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2020 s.d. 2021 dari sisi jumlah perguruan tinggi mengalami peningkatan, namun dari sisi jumlah kuota mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:



No	Bentuk PT	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah PT	Jumlah Kuota	Jumlah PT	Jumlah Kuota
1	Universitas	81	7.956	89	8.225
2	Institut	13	1.045	15	1.344
3	Sekolah Tinggi	76	3.296	90	2.610
4	Akademi	22	412	30	305
5	Politeknik	6	77	7	55
6	Akademi Komunitas	1	11	1	4
		199	12.797	232	12.543

Berdasarkan laporan dari LLDIKTI VII, dalam pendistribusi bantuan KIP Kuliah mengalami kendala sebagai berikut; (1) data input mahasiswa tidak valid, seperti NIM, NIK, Nomor rekening dll, (2) usulan pencairan dari PT sering terlambat, (3) retur karena kesalahan input data atau rekening pasif/mati, (4) penerima KIP Kuliah tidak tepat sasaran/tidak layak, (5) laporan penggunaan anggaran (LJP) terlambat dan (6) seringnya terjadi pergantian pengelola.

- k. Berdasarkan informasi LLDIKTI Wilayah VII, pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bagi perguruan tinggi swasta termasuk negeri sangat sulit diterapkan, khususnya untuk laksanakan 8 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi pada Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikut:

KODE	KETERANGAN	JUMLAH PRODI		JUMLAH MAHASISWA	
<b>A. LULUSAN YANG MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK</b>					
A.1.1.	A.1.1 Jumlah Mahasiswa Berwirausaha	593	26.82%	1,684	0.31%
A.1.2.	A.1.2 Jumlah Mahasiswa Studi Lanjut	335	15.15%	1,257	0.23%
<b>B. MAHASISWA MENDAPAT PENGALAMAN DI LUAR KAMPUS</b>					
B.1.1.	B.1.1 Mengajar di Sekolah	308	13.93%	1,965	0.36%
B.1.2.	B.1.2 Magang/Praktik Industri	701	31.71%	3,645	0.66%
B.1.3.	B.1.3 Proyek di Desa	592	26.78%	2,924	0.53%
B.1.4.	B.1.4 Pertukaran Pelajar	245	11.08%	1,501	0.27%
B.1.5.	B.1.5 Penelitian/Riset	471	21.30%	2,745	0.50%
B.1.6.	B.1.6 Wirausaha	372	16.82%	1,679	0.31%
B.1.7.	B.1.7 Studi/Proyek Independen	1,100	49.75%	1,476	0.27%
B.1.8.	B.1.8 Proyek Kemanusiaan	203	9.18%	1,953	0.36%

KODE	KETERANGAN	JUMLAH PRODI		JUMLAH DOSEN	
<b>C. DOSEN BERKEGIATAN DI LUAR KAMPUS</b>					
C.1.1.	C.1.1 Mengajar di kampus lain	153	6.92%	246	1.08%
C.1.2.	C.1.2 Mengajar di kampus QS100 berdasarkan kepakaran ilmu	24	1.09%	18	0.08%
C.1.3.	C.1.3 Bekerja sebagai praktisi (Perusahaan Multinasional, Perusahaan Teknologi Global, Perusahaan Start Up Teknologi, Organisasi Nirlaba Kelas Dunia, Organisasi Multilateral, Lembaga Pemerintah, BUMD, BUMN, PT, CV, Firma)	194	8.77%	662	2.90%
C.1.4.	C.1.4 Prestasi Mahasiswa Bimbingan minimal tingkat Nasional	155	7.01%	299	1.31%
<b>D. PRAKTIKI MENGAJAR DI KAMPUS</b>					
D.1.1.	D.1.1 Praktisi dengan Sertifikasi Kompetensi (LSK)/Sertifikasi Profesi	187	8.46%	472	2.07%
D.1.2.	D.1.2 Praktisi dengan Pengalaman Profesional di dunia Industri dan di dunia kerja.	228	10.31%	733	3.21%

KODE	KETERANGAN	JUMLAH PRODI		JUMLAH MAHASISWA		JUMLAH DOSEN	
<b>E. PROGRAM STUDI BERSTANDAR INTERNASIONAL</b>							
E.1.1.	E.1.1 Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional	55	2.49%				
E.1.2.	E.1.2 Lembaga akreditasi internasional lainnya	7	0.32%				
<b>F. KELAS YANG KOLABORATIF DAN PARTISIPATIF</b>							
F.1.1.	F.1.1 Case Method (Pemecahan Kasus)			91,888	16.74%	579	2.53%
F.1.2.	F.1.2 Team-Based Project			88,490	16.12%	529	2.32%
<b>G. PROGRAM STUDI BEKERJASAMA DENGAN MITRA KELAS DUNIA</b>							
G.1.1.	G.1.1 Pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran)	122	5.52%				
G.1.2.	G.1.2 Menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh)	118	5.34%				
G.1.3.	G.1.3 Riset Kolaborasi	80	3.62%				
G.1.4.	G.1.4 Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi	145	6.56%				
G.1.5.	G.1.5 Memberikan training bagi dosen dan instruktur	129	5.83%				

### 3. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Provinsi melakukan reaktivasi dan upaya pemulihan bagi para pelaku budaya melalui Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Program pengembangan kebudayaan diwujudkan dalam kegiatan pengelolaan kebudayaan, kegiatan pelestarian kesenian tradisional, dan kegiatan pembinaan Lembaga adat.

Adapun dalam program pengembangan kebudayaan yang lekat dengan para pelaku budaya, dalam hal ini seniman dan lembaga / komunitas seni adalah:

- a. Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan berupa:
  - i. Festival musik
  - ii. Festival karya tari
  - iii. Festival ludruk
  - iv. Festival wayang

- v. Penampilan kesenian dalam rangka event-event tertentu
- vi. Penampilan kesenian dalam rangka misi dagang
- vii. Uyon-uyon
- viii. Apresiasi wayang kulit
- ix. Pergelaran ludruk
- x. Pengusulan warisan budaya tak benda
- xi. Workshop *Biennale*
- xii. Sarasehan seniman tradisi
- xiii. Festival Kresnayana
- xiv. Pekan kebudayaan daerah
- xv. pergelaran periodik wayang kulit
- xvi. pergelaran periodik teater tradisi dan non tradisi
- xvii. pergelaran periodic lawak virtual
- xviii. parade musik
- xviii. gelar kolaborasi seni
- xix. gelar etnika Jawa Timur
- xx. Gelar Komposer
- xxi. Gelar Koreografer
- xxii. Parade Teater
- xxiii. Parade Wayang
- xxiv. Parade musik
- xxv. Fasilitasi kesenian berupa pertunjukan kesenian dan pameran
- xxvi. Sarasehan pedalangan
- xxvii. Sarasehan pelaku seni komedi tradisional
- xxviii. Kajian koleksi museum
- xxix. Penetapan dan pemeringkatan cagar budaya
- xxx. Eskavasi situs kumitir dan situs sumberbeji

b. Kegiatan pelestarian kesenian tradisional berupa:

- i. Pembinaan SDM lembaga dan pranata tradisional yang diwujudkan dalam bentuk Pendokumentasian Lembaga Budaya Jawa Timur.
- ii. Pengkajian dan pembuatan regulasi kelembagaan budaya Jawa Timur.
- iii. Inkubasi Taruna Budaya Jawa Timur.
- iv. Pembinaan Kebudayaan (Pengusulan WBTB Jawa Timur).
- v. Apresiasi Seniman dan Budayawan Jawa Timur.
- vi. Pendokumentasian kesenian yang telah tercatat dalam WBTB (Kesenian Topeng Dalang Sumenep dan Topeng Manduro Jombang).
- vii. Gelar Potensi WBTB Jawa Timur.

c. Pembinaan kesenian lintas kabupaten/kota, kegiatan yang berada dalam program ini antara lain:

- i. Pelatihan Bagi Pelaku Seni (Tari, Musik, Paduan Suara).
  - ii. *Training of Trainer*.
  - iii. Kolaborasi seni (paduan suara, musik *orchestra*, dan musik tradisi).
- d. Pengembangan dan pemanfaatan kesenian. Kegiatan yang menunjang pengembangan dan pemanfaatan kesenian dilakukan melalui :
- i. Penguatan kesenian (topeng dan ludruk).
  - ii. Peningkatan kreativitas seni pakeliran (dalang bocah), dan
  - iii. Pemanfaatan wastra jatim (batik dan tenun) dalam kegiatan east java fashion harmony
  - iv. Rekonstruksi wayang beber ke seni pertunjukan panggung
  - v. Festival Panji
- e. Program pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal.
- i. Pengembangan dan pemanfaatan potensi cagar budaya berupa kegiatan Pawitra Pradaksinapatha.
  - ii. *East Java Heritage Expo* Citragama Wali di Jawa Timur.
  - iii. *Folklore*, penulisan sejarah lokal.

#### 4. Bidang Pariwisata

- a. Pada bidang pariwisata, tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur sebesar -63,4%, namun kunjungan wisatawan nusantara naik sebesar 2,2%. Berikut data pergerakan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Timur dari tahunn 2015 s/d 2021:

TAHUN	Target Wisman (berdasarkan renstra)	Realisasi Kunjungan Wisman	Growth	Target Wisnus (berdasarkan renstra)	Realisasi Pergerakan Wisnus	Growth
2015	344.511	612.412		43.571.528	51.466.969	
2016	618.536	618.615	1,0%	52.508.556	58.068.493	12,8%
2017	624.721	690.509	11,6%	53.571.220	65.623.535	13,0%
2018	630.968	830.968	20,3%	54.655.388	70.935.415	8,1%
2019	637.278	770.826	-7,2%	55.761.496	82.471.694	16,3%
2020	847.588	113.355	-85,53%	73.025.870	30.411.085	-63,1%
2021	855.898	41.469	-63,4%	74.430.214	31.073.110	2,2%

- b. Perkembangan kunjungan wisatawan nusantara.
- 1) Kunjungan wisatawan nusantara.  
 Tahun 2020: 30.411.085 pergerakan wisatawan.  
 Tahun 2021: 31.073.110 pergerakan wisatawan.  
 Meningkat sebesar 2,2%.

- 2) Tahun 2022 sampai dengan triwulan I sebesar 5.713.881 mengalamikenaikan 6% dibanding tahun 2021 pada periode yang sama sebesar 5.186.243.
- 3) Tingkat penghunian kamar (TPK) pada bulan Februari 2022, Jawa Timur mendapatkan peringkat pertama dalam persentase hunian kamar sebesar 46,56% disusul Jawa Barat 39,04%, Jawa Tengah 37,59%, dan Bali 14,86% hal ini mencerminkan tingkat produktifitas usaha jasa akomodasi.
- 4) Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara di Jawa Timur tahun 2022 (sampai bulan Februari) sebesar 1,54 hari. Dukungan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemulihan pariwisata antara lain:
  - a) Mendukung pelaksanaan Program BALASA (Bantuan Lauk Pauk Siap Saji). Mendukung Gerakan BISA (Bersih Indah Sehat Aman) dan Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kepada seniman dan pengelola desa wisata).
  - b) Optimalisasi penerapan Protokol Kesehatan - CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) di destinasi & usaha pariwisata melalui kebijakan, sosialisasi maupun monitoring secara berkala (kementerian dan pemerintah provinsi).
  - c) Penyelenggaraan Event wisata yang memiliki *multi player effect*.
    - MICE dan festival daerah skala nasional maupun global secara *hybrid*.
    - MITF (menghadirkan *buyer* dari luar negeri) dalam rangka mendukung kunjungan wisatawan manca negara.
    - *East Java Fashion Harmony*, pameran wastra khas Jawa Timur.
    - *East Java Tourism Award*, kompetisi industri kepariwisataan di Jawa Timur.
    - Festival Kresnayana, *Jember Fashion Carnaval, Jazz Bromo Hybrid*, dan event-event lainnya.
    - *Direct promotion* dengan mendatangkan *buyer* dari luar provinsi, untuk mendukung pergerakan wisatawan nusantara.
    - Famtrip dengan peserta mahasiswa asing dan media baik dalam dan luar negeri.
  - d) Penguatan sistem informasi berbasis digitalisasi.
    - Chatbot Pariwisata Jawa Timur.
    - Virtual Tour.
    - Virtual Exhibition.
    - Virtual Event.
    - Mobile Apps Informasi Pariwisata.

e) Peningkatan kualitas SDM Pariwisata

- Pengelola Homestay.
- Pengelola Hotel.
- Pengelola Desa Wisata.
- Pemberdayaan masyarakat.
- Sertifikasi Profesi Pemandu Wisata.
- Penguatan Pokdarwis.
- Penyusunan Profil Desa Wisata.
- Bimtek Pembuatan Virtual Tour.
- Peningkatan kapasitas sumber daya lokal dll.

f) Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif

1) Fasilitasi pelaku ekraf untuk melakukan pameran bersama *hybrid*

- Pameran seni rupa.
- Pameran kriya (*handycraft*).
- Pameran wastra (batik dan tenun).
- Pameran kuliner.

2) Peningkatan pengetahuan bagi SDM ekonomi kreatif dalam bentuk:

- Workshop
- Sarasehan
- Temu insan kreatif, dengan materi tentang pelatihan desain produk, periklanan, fotografi dan lain – lain (*one pesantren one product* dll).
- Fasilitasi kepada pelaku seni pertunjukan kolosal Taman Chandra Wilwatikta Pandaan.

## 5. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

### a. Komposisi Pemuda

Berdasarkan komposisi jenis kelamin pemuda, jumlah pemuda laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah pemuda perempuan (50,38 persen laki-laki dan 49,62 persen perempuan dari total pemuda). Sementara itu berdasarkan kelompok umur pemuda, persentase pemuda tertinggi pada kelompok umur 19-24 tahun dengan persentase sebesar 40,74 persen.

### b. Pendidikan Pemuda

Pendidikan tertinggi pemuda Jawa Timur umumnya didominasi oleh pemuda yang tamat SMA/ sederajat yaitu sebesar 38,54 persen dan tamat SMP/ sederajat sebesar 37,60 persen. Sementara itu, pemuda yang

menamatkan pendidikan perguruan tinggi sebesar 9,62 persen. Dengan memperhatikan angka rata-rata lama sekolah (10,82 tahun) dan persentase pemuda Jawa Timur yang berijazah Perguruan Tinggi, menunjukkan masih banyak pemuda Jawa Timur yang tidak melanjutkan/tidak menyelesaikan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Padahal pendidikan tinggi memiliki fungsi yang sangat penting, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitar, serta membangun Jawa Timur lebih maju.

#### c. Ketenagakerjaan Pemuda

Sepertiga pemuda di Jawa Timur jenis pekerjaan utamanya sebagai tenaga produksi operator alat angkutan dan pekerja kasar, sedangkan pemuda yang bekerja sebagai teknisi atau tenaga profesional sangat sedikit. Persentase pemuda yang bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat angkutan dan pekerja kasar (34,81 persen). Selanjutnya diikuti tenaga usaha penjualan (21,36 persen), tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan dan perburuan (18,46 persen). Sementara itu hanya sekitar 8,81 persen pemuda Jawa Timur yang bekerja sebagai teknisi atau tenaga profesional. Hal ini antara lain karena minimnya keahlian profesional yang dimiliki oleh pemuda Jawa Timur.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dari tahun 2018 s/d 2022 telah melaksanakan beberapa kali kegiatan di Provinsi Jawa Timur. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

##### 1) Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

PPAN adalah salah satu program Kemenpora dalam mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, sekaligus mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang.

Daftar negara tujuan Program PPAN adalah Australia. Hasil evaluasi dari Dispora Provinsi Jawa Timur bahwa alumni dari PPAN mempunyai kompetensi yang bardaya saing tinggi. Mereka berkarir diberbagai bidang strategis dan memberikan kontribusi yang besar pada negara dan masyarakat. Sehingga perlunya konsistensi dari Kemenpora RI untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kegiatan tersebut.

##### 2) Pemuda Pelopor

Kepeloporan Pemuda adalah akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas

pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah. Pemilihan pemuda pelopor mencakup 5 (lima) bidang kepeloporan pemuda yaitu: Pendidikan; (2) Agama, Sosial, dan Budaya, (3) Pengelolaan Sumber daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, (4) Pangan dan (5) Inovasi Teknologi.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Pemuda Pelopor	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

3) Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

Adalah kegiatan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, memupuk rasa persatuan kesatuan, pemahaman keaneka ragaman seni budaya dan meningkatkan keterampilan kreativitas menuju kemandirian pemuda

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jambore Pemuda Indonesia	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dari data diatas bahwa kegiatan JPI dihapus dari kegiatan prioritas. Kegiatan tersebut merupakan ajang ekspresi dan tempat berkumpul dan berinteraksi pemuda dari seluruh Indonesia yang merupakan ujung tombak pemersatu Pemuda. Namun kegiatan tersebut tidak berkelanjutan sehingga perlu konsistensi dari Kemenpora RI.

4) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)

Pasukan Pengibar Bendera yang tugas utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan/atau nasional.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Paskibraka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dalam mendukung kegiatan Paskibraka, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dari tahun 2018 s.d. 2022 telah mengalokasikan anggaran sebesar:

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Anggaran	Rp. 1.808.000.000	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.700.000.000	Rp. 1.700.000.000	Rp. 1.340.000.000

5) Kirab Pemuda Nusantara

Merupakan kegiatan yang ditujukan bagi kaum pemuda untuk saling



mengenal perbedaan wilayah, suku, ras dan agama demi memperkuat rasa kebhinekaan di kalangan pemuda.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Kirab Pemuda Nusantara	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dari data diatas bahwa kegiatan Kirab Pemuda Nusantara dihapus dari kegiatan Kemenpora RI. Hasil Evaluasi dari Dispora Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut sangat strategis dalam upaya merawat kebhinekaan. Selain hal tersebut alumni dari Kirab Pemuda Nusantara mempunyai kompetensi yang handal saat ini berkarir ditempat strategis di tempat yang mempunyai korelasi dalam kebhinekaan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga perlu di kaji ulang oleh pihak Kemenpora RI untuk eksistensinya kembali kegiatan tersebut.

6) Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)

Kegiatan yang ditujukan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan kewaspadaan pemuda terhadap bahaya narkoba di lingkungannya.

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
KIPAN	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Pada tahun 2016, Kemenpora mengadakan pelatihan anti narkoba terhadap 400 (empat ratus) Pemuda di Jawa Timur. Pada tahun 2017 Dispora Prov Jawa Timur mawadahi kader tersebut dalam Forum Kader Pemuda Anti Narkoba (FKPAN) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) dan saat ini di Jawa Timur terdapat 1.000 (seribu) kader.

**6. Bidang Perpustakaan**

- a. Sejak Pandemi Covid-19 mulai masuk ke Jawa Timur pada Maret 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menutup sementara layanan baca di tempat untuk mencegah timbulnya kerumunan yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah beserta Surat-surat Edaran lain yang menindaklanjutinya.

- b. Selama penerapan pembatasan sosial karena Pandemi Covid-19, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tetap melayani masyarakat dengan koleksi digital (*e-book*) berbasis android yang dapat diakses melalui *dJatim* dan koleksi muatan lokal (*pusakajawatimuran*) yang berbasis web dan dapat diakses melalui *jawatimuran.disperpusip.jatim.go.id*.
- c. Dalam menyasiasi adanya pembatasan sosial juga, sejak Agustus 2020, layanan perpustakaan kepada masyarakat aktif dilakukan melalui sistem *drive thru/pengen buku* (peminjaman dan pengembalian online buku). Melalui sistem *drive thru*, pemustaka dapat mencari buku melalui *website*, memesan buku melalui form *online*, dan mengambil serta mengembalikan buku di loket *drive thru*.
- d. Selain menyelenggarakan layanan secara *drive thru*, selama Pandemi Covid-19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur aktif memberikan layanan kepada masyarakat secara *online* berupa:
- 1) Dongeng Online, yaitu kegiatan pembudayaan gemar membaca kepada anak-anak yang dilakukan secara *online* melalui media live Instagram.
  - 2) BAHASA (Bahas Apa Saja), yaitu layanan peningkatan literasi bagi masyarakat dengan membahas isu-isu aktual secara *online*.
  - 3) LARON (*Librarian Consultation*), yaitu pelayanan pendampingan akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan secara online
  - 4) Online English Conversation, yaitu belajar Bahasa Inggris secara *online*.
- e. Dalam rangka mendorong semangat membaca di masa pandemi, telah dibangun Gazebo Literasi, yaitu gazebo yang dilengkapi dengan teknologi panel surya ramah lingkungan, di mana masyarakat dapat memanfaatkan gazebo sebagai tempat membaca/belajar/berdiskusi yang dilengkapi pengisian daya baterai bertenaga surya pada gazebo.
- f. Setelah Pandemi Covid-19 mereda, layanan baca di tempat (*offline*) mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; sehingga pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara hybrid (*offline* dan *online*).
- g. Sampai dengan tahun 2022, Jawa Timur telah menerima program manfaat Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial dari Perpustakaan Nasional RI

sebanyak 26 kabupaten yang tersebar di 173 desa dan 5 kota di Jawa Timur.

- h. Selain itu terdapat upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan jumlah Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial dengan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI melalui Lomba Perpustakaan Desa yang telah dilaksanakan dari tahun 2008 – 2021 dengan tambahan tiap tahunnya sebanyak 10 perpustakaan desa.
- i. Total Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial yang ada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 313 Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial dari 3.666 Perpustakaan Desa atau 8,54%;
- j. Pada tahun 2022 dilaksanakan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur dengan peserta sebanyak 38 perpustakaan desa/kelurahan wakil dari 38 kabupaten/kota dengan salah satu poin nilai Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial.

## B. Data Kunjungan Lapangan ke Kampus Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

<b>Temuan</b>	
1.	IKIP Surabaya merupakan cikal bakal dari UNESA. Berdasarkan Keppres RI No. 93 Tahun 1999, IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Sesuai hasil keputusan rapat senat pada tanggal 12 Oktober 1998, yang menyepakati bahwa nama IKIP Surabaya pasca-konversi adalah Universitas Negeri Surabaya yang disingkat UNESA. Dalam bahasa Inggris, disepakati penyebutannya adalah <i>State University of Surabaya</i> .
2.	UNESA merupakan lembaga yang mempunyai misi ganda yang tetap memiliki basis sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). UNESA tetap menyelenggarakan misi utama, yaitu menyelenggarakan program kependidikan dan program non kependidikan, sehingga UNESA tetap bertugas sebagai penghasil tenaga kependidikan untuk pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada tahun 2022 akan menjadi PTN-BH yang saat ini masih menunggu penetapannya di Sekretariat Negara (Setneg).
3.	UNESA ditetapkan sebagai pelaksana Program MBKM peringkat 1 Nasional dan peringkat 2 dalam ketertiban penggunaan anggaran.
4.	Fokus perhatian internal civitas UNESA saat ini ialah memastikan pelaksanaan melaksanakan kebijakan kampus bebas kekerasan seksual sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, kampus bebas narkoba dan radikalisme.
5.	Dalam kunjungan ke Kampus UNESA, Komisi X DPR RI mendapatkan masukan berupa informasi dan aspirasi dari civitas antara lain: <b>Bidang Pendidikan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengharapkan agar program MBKM cakupan kapasitas pelibatan dunia industri dan dunia usaha diperluas khususnya industri pariwisata, dalam pelaksanaannya tidak terhambat prosedural birokrasi berbelit.</li><li>b. Mengharapkan penerapan kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tidak hanya diterapkan pada pendidikan tinggi, tapi juga sampai di tingkat pendidikan menengah. Sebagai informasi, UNESA telah bekerjasama dengan Kemendes PDTT RI untuk merokognisi pelaku pembangun desa agar pengetahuannya setara dengan pendidikan formal.</li><li>c. Program bantuan pendidikan mahasiswa seperti KIP, beasiswa unggulan dll, perlu dilanjutkan agar generasi muda bisa mengakses masuk ke</li></ol>

perguruan tinggi, namun perlu dievaluasi karena belum ada korelasi pemberian bantuan pada prestasi belajar mahasiswa penerima.

- d. Dalam pendistribusi bantuan pendidikan, Pemerintah Pusat perlu meningkatkan akurasi data agar pemberian bantuan tepat sasaran, serta menambah jalur pencairan bantuan agar pencairan bantuan tepat waktu.
- e. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dalam pembinaan pendidikan vokasi saat ini hanya melingkupi pendidikan tinggi vokasi belum menyentuh pendidikan menengah vokasi. Harapannya agar dalam revisi UU SISDIKNAS agar pendidikan menengah vokasi diatur lebih detail.
- f. Kebijakan moratorium pembukaan prodi-prodi sosial dan humaniora membuat keinginan Pemerintah Daerah untuk mendorong perguruan tinggi daerah membuka prodi PGSD terhambat untuk memenuhi kebutuhan guru SD yang berkualitas.

#### **Bidang Pariwisata - Kebudayaan**

- a. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang ada saat ini membuat kewenangan lintas K/L khususnya antara Kemendikbudristek RI dan Kemenparekraf/Baparekraf RI terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya dalam kaitan korelasi pembinaan kebudayaan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- b. Diharapkan dalam rencana revisi UU Kepariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku pariwisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan terlibat dalam pembangunan pariwisata nasional.
- c. Lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuat penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah tidak sejalan dengan kebijakan pembinaan kebudayaan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

#### **Bidang Olahraga**

Mendorong agar ada titik tengah dalam hal kebijakan untuk memenuhi keinginan keterlibatan atlet secara mandiri di ajang pertandingan internasional dengan kebijakan pengiriman atlet atas nama negara.

### **C. Permasalahan dan Temuan**

#### **1. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi**

- a. Provinsi Jawa Timur secara umum memiliki permasalahan sebagai berikut: (1) disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan antar lembaga masih terjadi, (2) sarana dan prasarana belum merata dan tidak sesuai dengan pemanfaatan, (3) belum adan relevansi antara penyelenggaraan pendidikan

tinggi dengan kebutuhan industri dunia kerja/usaha, (4) masih terdapat perbedaan kualitas, kuantitas, spesifikasi, kompetensi dan sebaran pada pengelolaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, (5) belum terjadi sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dan (6) kemampuan anggaran setiap sekolah masih bergantung pada jumlah siswa (BOS, BPOPP, komite sekolah).

- b. Dari sisi pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan di Provinsi Jawa Timur terjadi kesenjangan kapasitas fiskal antara sekolah yang satu dengan yang lain, sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan pelayanan yang diberikan. Kemampuan anggaran setiap sekolah yang masih bergantung pada jumlah siswa, karena skema pembiayaan berupa BOS dari Pemerintah Pusat maupun BOSDA (BPOPP) dari Pemerintah Daerah didasarkan kepada jumlah siswa, sehingga sekolah dengan jumlah peserta didik sedikit konsekuensinya menerima anggaran sedikit.
- c. Terkait pelaksanaan Seleksi 1 Juta Guru PPPK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai telah merugikan sekolah negeri dan sekolah swasta, dan dalam pelaksanaannya memiliki banyak permasalahan di antaranya: sekolah swasta kehilangan guru yang kompeten karena lolos PPPK yang penempatannya di sekolah negeri, GTT yang tidak lolos PPPK terancam kehilangan jam mengajar, karena masuknya Guru PPPK dari luar sekolah.
- d. Pendistribusi bantuan KIP Kuliah mengalami kendala sebagai berikut; (1) data input mahasiswa tidak valid, seperti NIM, NIK, Nomor rekening dll, (2) usulan pencairan dari PT sering terlambat, (3) retur karena kesalahan input data atau rekening pasif/mati, (4) penerima KIP Kuliah tidak tepat sasaran/tidak layak, (5) laporan penggunaan anggaran (LJP) terlambat dan (6) seringnya terjadi pergantian pengelola.

## **2. Bidang Kebudayaan**

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang ada saat ini membuat kewenangan lintas K/L khususnya antara Kemendikbudristek dan Kemenparekraf RI terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya dalam kaitan korelasi pembinaan kebudayaan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- b. Lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuat penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah tidak sejalan dengan kebijakan pembinaan kebudayaan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

## **3. Bidang Pariwisata**

Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata:

1. Adanya perubahan *trend* pariwisata (*sustainable tourism*) dari *mass tourism* ke *private*.
2. Perkembangan adopsi teknologi.

3. Sektor pariwisata memiliki peran besar terhadap ekonomi nasional akan menyedot banyak tenaga kerja.
4. Sektor pariwisata memiliki *multiplier effect* terhadap sektor ekonomi lainnya.
5. Regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia yang belum optimal.

#### 4. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

##### 1) Program Pembibitan

Program pembibitan menjadi sumber lahirnya atlet-atlet potensial yang bisa digadang-gadang menjadi atlet elit Indonesia.

##### a. Permasalahan

Bahan mentah atlet cukup banyak, yang menjadi kendala adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku. Proses pengayakan/pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku atlet ini membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan perlu dukungan peralatan yang berbasis teknologi mutakhir (digital), serta perlu adanya metode pengayakan yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

- Tenaga profesional pengayak sering bercampur dengan tenaga pelatih (rangkap kompetensi).
- Peralatan tes sudah banyak yang ketinggalan jaman (produk dan teknologi lama) dan tidak lengkap.
- Metode pengumpulan dan penyaringan calon bibit atlet yang kurang tepat, sehingga ketersediaan bahan mentah sering kurang berkualitas, hal ini akan berdampak pada proses penyaringan jadi tidak produktif dan hasilnya (bahan baku yang didapat) kurang maksimal.

##### b. Solusi

- Melakukan pemetaan kompetensi pelatih yang disesuaikan antar kebutuhan disiplin ilmu dan kompetensi tenaga pelatih yang berkompeten di bidangnya.
- Membeli peralatan tes yang canggih, menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan *sport science*.
- Melibatkan tenaga-tenaga ahli dibidang *sport science* untuk terlibat secara langsung dan independen untuk bisa melakukan pengukuran dan pemilihan bibit atlet yang terbaik.

##### 2) Program Pengembangan

Proses pengembangan ini menjadi salah satu titik awal yang bisa menentukan nasib dan prestasi bibit atlet yang akan dibina. Di proses ini bibit atlet mulai dikenalkan kepada cabang olahraga yang akan ditekuninya.

##### a. Permasalahan

- Proses pengembangan ini sering diabaikan. Para pelatih atau orang tua sering langsung masuk kepada tahap pembinaan prestasi.

- Terbatasnya tenaga pelatih diproses ini dapat mengakibatkan proses pengembangan tidak berjalan dengan baik. Detail proses sering dilewatkan karena perbandingan antara pelatih dan bibit atlet yang ditangani jauh tidak seimbang.
- Pengarahan yang kurang tepat dan teliti mengakibatkan nantinya bibit atlet salah dalam menekuni cabang olahraga atau dengan kata lain salah memilih cabang olahraga.

b. Solusi

- Pengetaan atau pengawasan terhadap pelaksanaan program latihan dilapangan. Pengaktifan kembali tim Monev (monitor dan evaluasi) untuk tiap cabor dengan metode pelaporan dan sidak terhadap proses latihan.
- Pemenuhan tenaga pelatih di tiap cabor, jika dimungkinkan menggunakan tenaga pelatih asing yang berkompetin dari negara yang sesuai dengan disiplin kecaborannya.
- Pengetatan standar untuk bisa menjadi pelatih dan sering mengadakan pelatihan pelatih (*coaching clinic*) atau mengirinkan pelatih untuk menimba ilmu di negara-negara yang memiliki tingkat kemajuan di bidang olahraganya tinggi.

3) Program Pembinaan

Proses bisa dilakukan setelah bibit atlet dikembangkan potensi dan talentanya, sehingga bahan baku ini siap untuk di proses menuju pematangan penguasaan cabang olahraga yang dimaksud.

a. Permasalahan

- Sering ditemui pelatih memberikan latihan dasar hanya setengah-setengah atau latihan dasar yang diberikan kepada atlet tidak tuntas. Hal ini akan berdampak pada kualitas gerakan yang dilakukan atlet tidak akan optimal, yang pada akhirnya akan membatasi penguasaan teknik si atlet dalam jangka panjang.
- Program pembinaan ini kadang terhenti oleh alasan non-teknis, seperti pendanaan program.
- Pengaruh dominan orang tua atlet kadang terjadi dalam program pembinaan ini. Atlet yang belum siap bertanding/berlomba dipaksakan untuk bisa mengikuti pertandingan yang bukan kelasnya.

b. Solusi

- Penyediaan pelatih yang berkompeten/bersertifikat dan minimal sudah berpengalaman melatih selama 5 tahun. Memahami dan mampu membuat perencanaan program latihan atau *annual plan* selama 1 tahun. Serta adanya tim pengawas terhadap pelaksanaan program latihan yang sudah dibuat.
- Permasalahan anggaran harus dituntaskan oleh para pemangku kepentingan dan disesuaikan dengan program latihan dan kebutuhan peralatan Latihan.



- Pembatasan akses orang tua terhadap anaknya yang menjadi atlet. Seluruh tanggung-jawab yang terkait program dan proses latihan diserahkan sepenuhnya kepada pelatih/*official team*.

#### 4) Program Peningkatan

Dalam program ini atlet diajarkan lebih dalam dan detail mengenai cabang olahraga yang ditekuninya. Proses ini membutuhkan kejelian dan ketelitian pelatih. Detail dari cabang yang bersangkutan harus benar-benar dilatihkan dengan rutin dan berkelanjutan.

##### a. Permasalahan

- Proses ini sering tidak berlanjut karena program pemusatan latihan sudah berakhir, bersamaan dengan berakhirnya sebuah pesta olahraga, baik nasional maupun internasional.
- Kurang seimbangnya perbandingan antara jumlah atlet dengan jumlah pelatih (max 1:4 atau tergantung cabang masing-masing).
- Kelengkapan *official team* sering tidak lengkap. Penanganan tim teknis dan nonteknis sering tumpang tindih atau hanya ditangani oleh 1 orang pelatih, karena tidak adanya kecukupan SDM yang direkrut (biasanya terbentur masalah terbatasnya anggaran). Pelatih dengan julukan 'PALUGADA' (apa lu mau, gua ada).

##### b. Solusi

- Perlu diadakan program pemusatan latihan jangka panjang yang tidak terputus hingga 1 tahun periode program pelatihan.
- Tersedianya tenaga pelatih yang profesional dan berkompeten dibidang kepelatihan, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kepelatihan dari lembaga resmi.
- Kelengkapan *official team* harus dipenuhi. Masing-masing SDM memiliki spesialisasi tersendiri dan tidak merangkap, misalnya pelatih fisik, pelatih teknik, masseur, psikolog dan ahli nutrisi.

#### 5) Program Kompetisi

Kompetisi ini memiliki manfaat yang sangat baik yaitu sebagai sarana untuk mengukur kemampuan atlet dan mengevaluasi keberhasilan dari program latihan yang telah dibuat dan dilaksanakan. Manfaat yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi atlet untuk melatih mental bertandingnya dan mendapatkan pengalaman bertanding diberbagai tingkatan.

##### a. Permasalahan

- Minimnya kalender kompetisi diberberapa cabang olahraga menjadi penyebab utama atlet menjadi kurang percaya diri dan kurang pengalaman untuk bisa dan mampu berkompetisi dengan para kompetitornya. Hal ini sangat mempengaruhi psikis atlet yang masih dalam tingkat yang rendah dalam hal penguasaan dan kepercayaan diri didalam suatu kejuaraan. (Kecuali bulutangkis dan beberapa olahraga beregu populer).

- Kualitas kompetisi yang kadang hanya sebatas 'asal ada kompetisi' atau sekedar kgugur kewajiban dalam menjalankan roda organisasi olahraga. Dan tidak adanya evaluasi secara detail dan menyeluruh terhadap pelaksanaan dan hasil kompetisi.
- Kurangnya jam terbang bagi para atlet elit untuk mengikuti kompetisi diluar negeri atau *tryout*, untuk menambah pengalaman dan ilmu dari situasi dan kondisi lawan-lawannya.

b. Solusi

- Mencoba merancang jadwal kompetisi yang berkualitas, padat dan berkelanjutan karena pembentukan mental tanding dan psikis yang tangguh bagi atlet harus melalui beberapa kali mengikuti kompetisi, dimana disetiap kompetisi yang diikuti terjadi proses pematangan mental dan peningkatan kemampuan untuk mengelola stres.
- Menjalankan kompetisi yang mengikuti standar pertandingan yang telah ditetapkan oleh federasi/induk olahraga internasional.
- Mengalokasikan khusus anggaran untuk *tryout* mengikuti pertandingan tingkat internasional.

#### D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah

1. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur/Kepala Dinas Pendidikan dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi:
  - a. Terdapat 52% sekolah di Jawa Timur memiliki peserta didik di bawah 100 peserta didik. Dengan kondisi seperti itu sekolah-sekolah tersebut membutuhkan bantuan operasional untuk tetap menjalankan layanan pembelajaran.
  - b. Pelibatan perusahaan dan industri dalam mendukung pendidikan di Provinsi di Jawa Timur sudah dilakukan, saat ini, BUMD berkewajiban berkontribusi minimal 2% dan perusahaan swasta minimal 1% keuntungannya untuk membantu pendidikan disabilitas.
  - c. Mengusulkan agar ada kebijakan kemudahan kesetaraan SMA bagi santri yang tidak mengikuti pendidikan formal dengan skema ada asesmen khusus untuk santri layaknya Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016.
  - d. Mengusulkan Sekolah Luar Biasa berada di bawah kewenangan Direktorat Pendidikan Vokasi, karena peserta didik SLB sangat membutuhkan pendidikan vokasi.
  - e. Mengusulkan agar guru yang telah melewati *passing grade* dalam tahap I dan tahap II Seleksi 1 Juta Guru PPPK tahun 2021 namun tidak lulus karena kurang kuota agar pada seleksi tahap III yang akan dilaksanakan tahun 2022 langsung diluluskan.
  - f. Kebijakan moratorium pembukaan SMU di Provinsi Jawa Timur sudah dicabut, namun SMU yang boleh mendapatkan ijin operasional baru hanya SMU yang

berbentuk *boarding school*, SMU yang mengajarkan pendidikan vokasi, dan SMU yang didirikan sebelum tahun 2017.

2. Perwakilan PGRI Jatim dalam kesempatannya menyampaikan aspirasi yaitu mengharapkan Pemerintah Pusat untuk memperbanyak formasi untuk menyelesaikan persoalan peserta Seleksi 1 Juta Guru PPPK namun belum mendapatkan formasi. Selain itu meminta agar kebijakan afirmasi didasarkan pada masa kerja pengabdian bukan sertifikat pendidikan.
3. Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur dalam kesempatannya menyampaikan informasi:
  - a. Menilai pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bagi perguruan tinggi swasta termasuk negeri sangat sulit diterapkan, dan meminta agar perguruan tinggi secara bijak menerapkan MBKM agar lulusan memiliki kompetensi sesuai yang ditekankan oleh prodi.
  - b. Mempertanyakan kebijakan regulasi yang terdapat di dalam Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang membolehkan lembaga LLDIKTI dipimpin oleh orang yang belum memiliki pengalaman memimpin perguruan tinggi.
4. Ahmad Yazidi, Perwakilan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal diantaranya:
  - a. Mempertanyakan keberadaan akademi komunitas di Undang-Undang Perguruan Tinggi namun tidak dijalankan oleh Kemendikbudristek RI.
  - b. Menilai Kebijakan MBKM dengan mengambil 3 semester (140 SKS) untuk belajar di luar kampus dan prodi terlalu banyak dan mengurangi porsi mata kuliah kompetensi wajib. Kemudian meminta agar ada pedoman yang jelas bagi PT dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, serta meminta agar PT secara bijak menerapkan MBKM agar sesuai dengan kompetensi wajib/prodi.
5. Perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan aspirasi di antaranya:
  - a. Mendorong agar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata segera mendapatkan peraturan turunan agar bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Meminta agar batasan dan pengertian jelas antara Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa Pramuwisata di dalam upaya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
  - c. Pemerintah Daerah membutuhkan kejelasan dan pemahaman kewenangan provinsi dan daerah di dalam pengelolaan destinasi wisata, seperti parameter penetapan destinasi wisata dan penataannya di dalam NSPK.
  - d. Perlu ada ketegasan masuknya beberapa isu UU Kepariwisata ke dalam UU Cipta Kerja khususnya bidang ijin, usaha dan kewenangan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum penyelenggaraan pariwisata.

6. Perwakilan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mempertanyakan mekanisme pemanfaatan dana desa agar bisa digunakan untuk membangun dan mengelola Perpustakaan desa.
  - b. Mendorong agar dana pembinaan perpustakaan sekolah yang dikelola oleh Kemendikbudristek RI ditingkatkan.

### III. KESIMPULAN

#### a. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

1. Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Timur secara umum berjalan baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa program unggulan yang dirangkum di dalam Program Jatim Cerdas, yaitu; (1) Program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), (2) Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK, (3) Program Negeri Taruna Jatim, (4) Program SMA *Double Track*, (5) Program Revitalisasi SMK, (6) Program BODSA MADIN dan (7) Program Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan, namun penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Timur masih memiliki permasalahan sebagai berikut; (1) disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan antar lembaga masih terjadi, (2) sarana dan prasarana belum merata dan tidak sesuai dengan pemanfaatan, (3) belum adanya relevansi antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dunia kerja/usaha, (4) masih terdapat perbedaan kualitas, kuantitas, spesifikasi, kompetensi dan sebaran pada pengelolaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, (5) belum terjadi sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dan (6) kemampuan anggaran setiap sekolah masih bergantung pada jumlah siswa (BOS, BPOPP, Komite Sekolah).
2. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Provinsi Jawa Timur sejak 2 Januari 2022 telah diwajibkan untuk semua satuan pendidikan dengan protokol kesehatan ketat berdasarkan level PPKM daerah masing-masing. Adapun pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga guru, tenaga kependidikan dan peserta didik di Provinsi Jawa Timur sudah dilaksanakan mencapai rata-rata di atas 94% untuk vaksin I dan 91% untuk vaksin II.  
Selama masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan fasilitas Anjungan Belajar Mandiri (ABM) yang merupakan bagian dari Program Jatim Cerdas ditujukan untuk meningkatkan akses bahan pembelajaran pada daerah atau kawasan yang tidak dijangkau internet (*blankspot*). Anjungan Belajar Mandiri (ABM) – Jatim Cerdas merupakan sistem manajemen pembelajaran (*Learning Manajemen System*) yang dapat dioperasikan secara *online* maupun secara *offline* (luar jaringan) peserta didik untuk mengunduh dan mencetak bahan ajar (*e-book*, video, lembar kerja siswa, dan berbagai latihan soal).

3. Pelaksanaan Seleksi 1 Juta Guru PPPK di Provinsi Jawa Timur secara umum berjalan lancar, namun masih menyisakan beberapa permasalahan pasca pelaksanaan seleksi, diantaranya sekolah swasta kehilangan guru yang kompeten karena lolos PPPK yang penempatannya di sekolah negeri, GTT yang tidak lolos PPPK terancam kehilangan jam mengajar, karena masuknya Guru PPPK dari luar sekolah. Adapun yang lulus di tahap I sebanyak 5.326 peserta, dan pada tahap II sebanyak 3.819 peserta, sehingga total yang lulus sebanyak 9.154 peserta. Dari jumlah yang lulus, sebanyak 9.106 telah mendapatkan SK PPPK.
  
4. Pada bidang pendidikan tinggi, yang menjadi sorotan utama ialah pelaksanaan program MBKM dan distribusi bantuan KIP Kuliah. Sebagian besar perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur baik swasta maupun negeri mengalami kesulitan melaksanakan program MBKM berdasarkan 8 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi pada Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Terkait distribusi bantuan KIP Kuliah pada perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dari sisi jumlah perguruan tinggi mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 199 PT dan pada tahun 2021 naik sebanyak 232 PT, namun dari sisi jumlah kuota mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 12.797, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 12.543. Pelaksanaan penyaluran bantuan KIP Kuliah mengalami kendala sebagai berikut; (1) data input mahasiswa tidak valid, seperti NIM, NIK, nomor rekening dll, (2) usulan pencairan dari PT sering terlambat, (3) retur karena kesalahan input data atau rekening pasif/mati, (4) penerima KIP Kuliah tidak tepat sasaran/tidak layak, (5) laporan penggunaan anggaran (LJP) terlambat dan (6) seringnya terjadi pergantian pengelola.

**b. Bidang Kebudayaan**

Terdapat beberapa temuan persoalan pembinaan kebudayaan di antaranya; (1) tumpang tindih kewenangan lintas K/L dalam kaitan korelasi pembinaan kebudayaan dan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyisakan persoalan siapa penanggung jawab manajemen pariwisata berbasis budaya di daerah dan (2) lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuat penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah tidak sejalan dengan kebijakan pembinaan kebudayaan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

**c. Bidang Pariwisata**

1. Perkembangan kepariwisataan domestik maupun internasional, terutama pasca pandemi memerlukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Perlunya penguatan kelembagaan pariwisata dan penataan sumber daya manusia di bidang pariwisata agar lebih optimal.
3. Kemajuan sarana teknologi informasi yang terus berkembang dimana dunia kepariwisataan memerlukan adaptasi dan penguatan sistem informasi berbasis digital.
4. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, perlu didorong intensitas fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan seni pertunjukan di berbagai destinasi wisata.

#### **d. Bidang Olahraga dan Kepemudaan**

1. Pentingnya fasilitasi pengembangan wawasan dan kreatifitas pemuda penyandang disabilitas, dimana hanya ada 2,44% pemuda dengan disabilitas yang bekerja di sektor formal, sedangkan persentase pemuda nondisabilitas yang bekerja di sektor formal mencapai 30,92% atau 15 kali lipat. Kondisi ini tentunya menuntut adanya perhatian lebih tersedianya akses bagi pemuda penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama.
2. Perlunya jenjang pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena selama ini di Jawa Timur sebagian besar hanya membina dari sekolah menengah pertama (SMP) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Setelah lulus SMA belum ada wadah untuk kelanjutan pembinaan tersebut kecuali mereka yang masuk Puslatda atau Pelatnas, sedangkan olahraga itu membutuhkan regenerasi yang sangat cepat untuk mengejar ketersediaan atlet.
3. Dibutuhkan dukungan sarana prasarana yang bertaraf internasional dan sarana tersebut bisa dipakai atau mudah diakses oleh masyarakat luas.

#### **e. Perpustakaan dan Literasi**

Secara umum penyelenggaraan layanan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur selama diterapkannya pembatasan sosial karena pandemi Covid-19 tergolong baik. Hal ini ditandai dengan berbagai macam bentuk program layanan perpustakaan berbasis digital yang telah dilakukan diantaranya; (1) layanan masyarakat dengan koleksi digital (*e-book*) berbasis android yang dapat diakses melalui *dJatim* dan koleksi muatan lokal (*pusakajawatimuran*) yang berbasis web yang dapat diakses melalui *jawatimuran.disperpusip.jatim.go.id*, (2) sistem *drive thru/pengen buku (peminjaman dan pengembalian online buku)*, (3) layanan kepada masyarakat secara *online* lain berupa *Dongeng Online*, *BAHASA (Bahas Apa Saja)*, yaitu layanan peningkatan literasi bagi masyarakat dengan membahas isu-isu aktual secara *online*, *LARON (Librarian Consultation)*, yaitu pelayanan pendampingan akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan secara *online* dan *Online English Conversation*, yaitu belajar Bahasa Inggris secara *online*.

Setelah Pandemi Covid-19 mereda, layanan baca di tempat (*offline*) mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; sehingga pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara *hybrid (offline dan online)*.

Dalam hal pembinaan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah, pemangku perpustakaan di Jawa Timur meminta agar perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah mendapat perhatian dan kejelasan dari sisi anggaran.

## IV. REKOMENDASI

### a. Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI bersama Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penyelenggaraan di daerah antara lain: (1) disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan satuan pendidikan, (2) sarana dan prasarana belum merata dan tidak sesuai dengan pemanfaatan, (3) belum adanya relevansi antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dunia kerja/usaha, (4) masih terdapat perbedaan kualitas, kuantitas, spesifikasi, kompetensi dan sebaran pada pengelolaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, (5) belum adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dan (6) kemampuan anggaran setiap sekolah masih bergantung pada jumlah siswa (BOS, BPOPP, Komite Sekolah).
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KemenPAN-RB RI untuk menyusun peraturan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul pasca seleksi dan memastikan seleksi guru PPPK tahun 2022 tidak terdapat kendala teknis, juga pelaksanaannya memperhatikan hasil evaluasi serta perbaikan proses seleksi tahap-tahap sebelumnya.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan memastikan tidak melanggar asas otonomi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 62 ayat (1), tidak menjadikan 8 Indikator Kinerja utama MBKM (IKU – MBKM) sebagai kriteria kampus maju dan memperbaiki pola komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga perguruan tinggi sebagai pelaksana program dapat memahami secara baik dan tepat
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan layanan pencairan bantuan pendidikan seperti PIP, KIP Kuliah dan beasiswa unggulan khususnya untuk wilayah 3T serta memastikan pemberian bantuan pendidikan tepat sasaran, berkorelasi pada prestasi belajar peserta didik dan mahasiswa penerima.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI dan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan pariwisata budaya. Kemudian kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan koordinasi guna melestarikan, merawat dan terus mengeksplorasi cagar budaya sehingga menjadi bagian nilai jual pariwisata budaya.

### b. Bidang Pariwisata

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menghadapi perkembangan kepariwisataan domestik maupun internasional terutama pasca pandemi Covid-19.

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengambil langkah strategis dalam penguatan kelembagaan pariwisata dan penataan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memperkuat sistem informasi berbasis digital agar perkembangan kepariwisataan sejalan dengan kemajuan sarana teknologi informasi yang terus berkembang pesat.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi kreatif dengan melakukan intensitas fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan berbagai seni pertunjukan di destinasi wisata.

**c. Bidang Olahraga dan Kepemudaan**

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI memfasilitasi pengembangan wawasan dan kreatifitas pemuda penyandang disabilitas.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI membuat regulasi terkait jenjang pembinaan olahraga yang berkelanjutan agar proses regenerasi atlet berjalan dengan baik.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI memperkuat pengembangan sarana prasarana olahraga bertaraf internasional dan mudah diakses oleh masyarakat.

**d. Bidang Perpustakaan dan Literasi**

1. Komisi X DPR RI mendesak Perpustakaan Nasional RI untuk berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI dalam dukungan pembinaan perpustakaan sekolah dan KemendesPDTT RI untuk membangun dan mengelola perpustakaan desa dengan menggunakan dana desa.
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI bersama K/L dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama menormalisasi layanan perpustakaan pasca pandemi Covid-19 dan meningkatkan sinergitas dalam upaya pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan perpustakaan di daerah.

**V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Timur, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 14 Mei 2022

**Ketua Tim/Wakil Ketua  
Komisi X DPR RI**

Ttd.

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM  
A-444**